

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELA NEGARA DI PERBATASAN : STUDI KASUS DI PROVINSI PAPUA

Syarifudin Tippe*

Email: syarifudin_tippe@yahoo.com

ABSTRAK

Sejak dimulainya proses integrasi ke wilayah NKRI pada tahun 1963 hingga kini, Papua tidak pernah luput dari konflik vertikal dan horizontal, yang implikasinya antara lain merefleksikan ancaman disintegrasi bangsa yang cukup serius. Berbagai upaya pemerintah di semua aspek kehidupan telah dilaksanakan, namun belum berhasil. Penelitian *CDBR (Center for Defence Boundary Research)* Unhan (Universitas Pertahanan Indonesia) ini fokus pada implementasi kebijakan bela negara sebagai bagian penting dari kebijakan Kementerian Pertahanan RI, khususnya mengevaluasi cara implementasi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memantapkan nasionalisme Indonesia bagi semua pihak terkait dalam rangka memberikan dukungan terhadap pemecahan berbagai masalah di Papua.

Grounded Theory yang digunakan sebagai metode penelitian ini berdasar pada deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, metode ini menghasilkan tiga isu atau tema yaitu: (1) politik NKRI vs politik abolisi; (2) pemberdayaan masyarakat; dan (3) keamanan dan pengamanan perbatasan; Ketiga tema tersebut mencerminkan dua hal: pertama merupakan fenomena yang lebih bernuansa sosial-budaya masyarakat Papua sehingga dibutuhkan pendekatan teori antropologi sosial budaya, kedua karena masalah pokok yang diteliti adalah masalah pertahanan, khususnya implementasi kebijakan bela negara, rujukan keilmuan yang lebih tepat adalah pertahanan. Berdasarkan temuan di atas, diperlukan proses sintesis antara ilmu pertahanan yang bernuansa sosial-budaya dan antropologi sosial budaya.

Proses analisis dan sintesis di atas melahirkan sebuah teori baru yang disebut “antropologi pertahanan”. Artinya, teori tersebut sekaligus menunjukkan cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan bela negara di Papua.

Keywords: Implementasi kebijakan bela negara; masyarakat perbatasan Papua; antropologi pertahanan.

ABSTRACT

Since the beginning of its integration into the Republic of Indonesia in 1963 until now, Papua has never been free from vertical and horizontal conflicts, the implications of which reflect serious threats of disintegration. Various efforts of the Government in all aspects of life have been implemented, but to no avail. CDBR (Center for Defense Boundary Research) of Unhan (Indonesian University of Defense) focuses on the implementation of the state defense policy as an important part of the policy of the Ministry of Defence, in particular in evacuating the method of implementation used. The goal is to strengthen Indonesian nationalism among all parties involved in order to provide support for solving various problems in Papua.

Grounded Theory used as a research method is based on a qualitative descriptive analytical approach. Based on the research findings, this method produces three issues or

themes, namely: (1) Indonesian homeland politics versus political abolition, (2) society empowerment, and (3) border safety and security. The three themes reflect two things: the first is a phenomenon that has more socio-cultural nuance of the Papuans and thus needs an approach of socio-cultural anthropological theory; the second is that as the subject matter studied is a matter of defense, in particular the implementation of the state defense policy, the more appropriate scientific references are those of defense. Based on the findings, a synthetical process between the science of defense with socio-cultural nuance and socio-cultural anthropology is needed.

The analytical and synthetical process above results in a new theory called "Defense Anthropology". It means that the theory also shows the most appropriate way to implement the policy to defend the state in Papua.

Keywords: *Implementation of policies to defend the state; Papuan communities in the borders; defense anthropology.*

* Dosen Fakultas Manajemen Pertahanan,
Universitas Pertahanan Indonesia, FE dan Pasca
Sarjana, MSDM, UNJ

PENDAHULUAN

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, intensitas perhatian pemerintah terhadap pengelolaan perbatasan pun semakin meningkat, setidaknya sejak era pemerintahan Megawati hingga sekarang. Hal itu mulai menjadi perhatian sejak 2004, yaitu sejak merebaknya isu bergesernya patok perbatasan di garis perbatasan antara Kalimantan dengan Serawak disusul dengan peristiwa Ambalat (2005) di perairan antara dua negara, Indonesia-Malaysia. Hampir semua pihak mendorong pemerintah Indonesia agar memprioritaskan pengelolaan perbatasan.

Istilah *perbatasan* sebagai “beranda depan” pun semakin mengemuka. Istilah tersebut bahkan dijadikan paradigma tersendiri untuk mendesak pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat perbatasan. Untuk itu, kemudian, lahirlah Undang-Undang RI No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sesuai dengan mandat undang-undang tersebut dibentuklah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dengan Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2010.

Menyikapi kondisi di atas, Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) terpanggil untuk membentuk sebuah pusat pengkajian/penelitian yang disebut *CDBR* (*Center for Defence Boundary Research* = Pusat Penelitian Perbatasan bidang Pertahanan). *CDBR* dengan mitra kerjanya antara lain LIPI, Bakosurtanal, dan beberapa perguruan tinggi pemerhati perbatasan, berturut-turut sejak akhir tahun 2009 hingga akhir tahun 2012, telah menurunkan tim penelitiannya ke berbagai wilayah perbatasan darat dan laut. Terkait dengan tugas pokok Kemhan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan, termasuk di Papua, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potan) Kemhan RI merumuskan kebijakan bela negara dengan muatan lima

nilai, yaitu (1) cinta tanah air; (2) kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara; (4) rela berkorban untuk bangsa dan negara; serta (5) memiliki kemampuan awal bela negara. Kepemilikan dan kesadaran seseorang terhadap lima nilai bela negara tersebut dapat diartikan bahwa orang tersebut telah memiliki jiwa nasionalisme.

Pertanyaannya, apakah masyarakat Papua dengan kondisi terkini memiliki jiwa nasionalisme Indonesia? Tak disangkal lagi, Berbagai isu kritis Papua belakangan ini cukup menyita perhatian publik dalam dan luar negeri dan tentu menarik untuk diteliti lebih jauh tentang jawaban atas pertanyaan tersebut. Apalagi dengan adanya hasil penelitian terdahulu bahwa masyarakat Papua memiliki nasionalisme ganda (Teteray, 2012). Di samping itu, terdapat berbagai stigma dan permasalahan yang cukup pelik dalam rangka implementasi kebijakan bela negara dimaksud. Gambaran umum fenomena itu antara lain adalah lemahnya manajemen pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah setempat, serta berbagai permasalahan lain yang kompleks seperti stigmatisasi OPM, kurang profesionalnya birokrat lokal, dan masuknya kapitalis global yang tidak memihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Ironisnya, jalan keluar dari semua permasalahan tersebut disederhanakan dengan stigma bahwa Papua ingin merdeka dan berdiri sendiri di luar NKRI. Padahal belum tentu hal itu merupakan keinginan seluruh rakyat Papua.

Isu lain yang mencuat adalah eksploitasi kekayaan sumber daya alam secara besar-besaran namun justru menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi, dan isu pelanggaran HAM. Faktanya, telah banyak didiskusikan bahwa di Papua tidak saja terdapat dikotomi antara wilayah pantai dan pegunungan, tetapi juga ada pertentangan antarentitas mikrolokal, seperti perang antarsuku. Rakyat Papua memiliki tradisi menyelesaikan konflik dengan perang atau

perang antarsuku, apalagi di Papua terdapat 268 bahasa daerah dan 255 suku dengan bahasa masing-masing yang berbeda. Hal ini menyebabkan konflik dan perang antarsuku menjadi sebuah realita yang sulit dihilangkan karena sudah biasa dan menjadi bagian hidup keseharian mereka. Oleh karena itu, sejatinya penyelesaian masalah Papua sebenarnya belum tentu sesuatu yang seram seperti pemberitaan selama ini, hanya saja Papua membutuhkan cara dan pendekatan khusus yang menghendaki adanya keberpihakan pemerintah kepada rakyat Papua dengan segala kenyataannya.

CDBR menangkap setidaknya ada dua buah pesan dari fenomena tersebut. Pertama, yang lebih bersifat umum, berbagai kebijakan telah digulirkan untuk perbaikan kondisi di Papua, termasuk para peneliti seolah berlomba melakukan penelitian untuk mencoba mengungkap pakar masalah di Papua, namun belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Pesan kedua, khusus kebijakan perbatasan di bidang pertahanan, oleh Kementerian Pertahanan RI telah dirumuskan dan diimplementasikan kebijakan bela negara melalui berbagai elemen masyarakat. Namun, hasilnya juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda kematangan kesadaran bela negara, tidak hanya bagi rakyat asli Papua tetapi juga masyarakat di Papua umumnya.

Atas kedua pesan itulah, CDBR Unhan menurunkan tim peneliti ke Papua dengan mengusung pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan bela negara di perbatasan Papua? Maksud penelitian ini adalah mengevaluasi cara pendekatan yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan bela negara, dengan tujuan untuk memantapkan nilai nasionalisme dan patriotisme bagi semua pihak yang terlibat guna mendukung pemecahan masalah di Papua. Manfaat penelitian adalah secara akademis mengembangkan khazanah keilmuan dan pengetahuan bagi kalangan akademisi yang konsern dengan nilai-nilai nasionalisme dan

patriotisme bangsa Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Papua. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Ditjen Potan, Kemhan sebagai perumus kebijakan bela negara baik di tanah air pada umumnya, maupun di wilayah perbatasan Papua pada khususnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam terhadap beberapa tokoh di Papua, baik unsur pejabat pemerintah pusat di daerah, pejabat pemerintah daerah di Papua, dan masyarakat asli Papua (baik tokoh maupun aktivis). Selain data primer, dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang dipakai sebagai data pelengkap analisis atau pembahasan.

LANDASAN TEORETIS DAN METODE PENELITIAN

a. Teori dibangun dari bawah (*grounded theory*)

Berdasarkan karakteristik fokus penelitian, jenis teori yang diacu dalam penelitian ini sebetulnya juga merupakan bagian dari metode penelitian. Jenis teori dimaksud adalah *grounded theory* (Glaser dan Strauss 1985) (Sukidin, 2002:22). Lebih lanjut berkenaan dengan teori ini Sukidin menjelaskan “Pendekatan *grounded theory* adalah suatu cara penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menghasilkan teori”. Dengan kata lain, *grounded theory* adalah suatu metode keilmuan yang prosedurnya dirancang sedemikian rupa sehingga para peneliti dapat menerapkan suatu teori baru. Singkatnya, *grounded theory* adalah suatu metodologi umum untuk mengembangkan teori yang dalam pengumpulan data dan analisisnya mendasarkan secara sistematis. Teori dikembangkan selama melakukan penelitian bersamaan dengan pengumpulan data sehingga pendekatan ini sering disebut

sebagai “analisis komparatif konstan”. Teori *Grounded* yang dihasilkan dalam penelitian ini ditarik secara induktif dari fenomena yang mewakili. Seorang peneliti tidak memulai penelitian dengan suatu teori dan kemudian membuktikannya, tetapi memulai dengan suatu wilayah penelitian dan apa yang relevan dengan wilayah tersebut untuk dimunculkan guna disusun suatu teori” (Sukidin, 2002:23). Dalam penerapannya, *grounded theory* ini mensyaratkan peneliti untuk menguasai dua metode pokok, yaitu *pertama*, peneliti harus mampu melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh. Penafsiran harus dilakukan secara hati-hati dan positif berdasarkan prosedur yang khas dan spesifik. *Kedua*, peneliti harus kreatif. Prosedur kedua ini memaksa peneliti untuk mengatasi asumsi-asumsi dan menciptakan asumsi baru. Manifestasi kreativitas ini mempunyai kemampuan menentukan kategori yang paling tepat dan meluaskan pikiran dalam rangka melakukan suatu penemuan teori (Sukidin, 2002:25). Senada dengan intisari pendapat Sukidin, yang mencakup tentang proses penemuan teori maupun metode pokok yang harus dikuasai oleh peneliti, Moleong (2010:26) berpendapat bahwa teori perlu di-*grounded*, artinya ketika peneliti memasuki langkah verifikasi dan ikhtisar usaha peneliti tersebut cenderung berkembang secara perlahan menapaki kategori inti yang pusat. Dengan kata lain, teori tersebut dibangun berdasarkan suatu proses dari bawah terhadap suatu pengamatan fenomena, sampai menjadi sebuah istilah, atau penamaan sebuah teori (Moleong, 2010:27). Selanjutnya, Moleong (2010) mensimplifikasi keseluruhan proses tersebut ke dalam lima tahapan, yaitu (1) pentranskripan hasil wawancara, (2) pengeditan, (3) pendeskripsian secara tematik, (4) pereduksian, dan (5) penganalisisan secara deskriptif (Moleong, 2010:245-317).

a. Ilmu Pertahanan

Kehadiran Unhan dalam pengembangan khasanah keilmuan di

Indonesia, khususnya terkait dengan pengembangan ilmu pertahanan telah membawa implikasi tersendiri. Implikasi tersebut setidaknya terlihat pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) 18 Oktober 2012 di kampus Unhan, dan lokakarya 23 Oktober 2012 di hotel Borobudur, Jakarta yang menghadirkan sejumlah praktisi, ilmuwan, dan pemerhati di bidang pertahanan yang mewakili sejumlah institusi, perguruan tinggi, dan perseorangan untuk membahas dan sekaligus meluncurkan pertahanan sebagai cabang ilmu. Perkembangan ilmu pertahanan (*defense science*) di Indonesia tersebut sejalan atau mengiringi perkembangan ilmu pertahanan di negara maju, seperti USA, UK, Australia, China, India, dan Singapura.

Keabsahan pertahanan di Indonesia sebagai ilmu, dari hasil FGD dan lokakarya, sebagaimana ilmu lainnya, harus memenuhi tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam tinjauan ontologi, studi pertahanan adalah studi tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan pertahanan negara. Kebutuhan untuk mempelajari masalah-masalah pertahanan, secara filosofis berangkat dari keberadaan suatu entitas yang disebut negara (*state*), dan kebutuhan untuk mempertahankan diri (*survive*) dari ancaman terhadap negara tersebut. Menurut pandangan epistemologi, pengalaman Indonesia dalam mempertahankan keberadaannya sejak perang kemerdekaan hingga kini, secara empirik memiliki sifat interdisipliner, tidak hanya berkisar pada pengerahan kekuatan militer pada masa perang, tetapi juga berbagai disiplin ilmu nonmiliter, yang diterapkan pada masa damai, seperti *politics (sociology of defence)*, *defence economics*, *culture*, *technology*, *international relations*,

peace, and institutions. Dari aspek metodologi, ilmu pertahanan yang bersifat interdisipliner mengikuti metode kelimuan sesuai dengan disiplin ilmu yang menjadi *leading theory* dalam sebuah penelitian atau pengkajian yang menggunakan ilmu pertahanan sebagai pendekatan utama. Secara aksiologi atau dari segi nilai manfaat, ilmu pertahanan telah dirasakan manfaatnya. Manfaat tersebut adalah sepanjang perjalanan sejarah kemerdekaan untuk melawan dan mengusir penjajah dari bumi Indonesia, mengatasi berbagai konflik dalam masa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional hingga sekarang. pada dasarnya ilmu pertahanan telah memberi manfaat yang sangat besar terhadap eksistensi bangsa dan NKRI.

Terkait dengan masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan bela negara yang perwujudannya melalui penyelenggaraan pertahanan negara, telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”; ayat (2) berbunyi “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui a. pendidikan kewarganegaraan, b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan d. Pengabdian sesuai profesi”; dan ayat (3) berbunyi “ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi *leading theory* dalam penelitian ini adalah ilmu pertahanan,

sementara tiga ilmu lainnya bersifat mendukung.

b. Antropologi

Berkenaan dengan fokus penelitian yang mengedepankan Papua sebagai salah satu entitas budaya, unsur-unsur kebudayaan perlu dipahami sebagai cakupan dalam penerapan antropologi. Di kalangan sarjana antropologi, terdapat berbagai perbedaan pandangan tentang unsur kebudayaan. Salah satunya adalah C. Kluckohn dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Universal Categories of Culture* (1953), menyatakan bahwa intisari unsur-unsur kebudayaan universal itu terdiri atas tujuh unsur yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur yang menjadi intisari tiap kebudayaan di dunia itu diuraikan sebagai bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat dalam Moleong, 2010:165).

Salah satu bidang keilmuan yang terkait dengan unsur-unsur kebudayaan di atas, adalah antropologi. Prof. Dr. Koentjaraningrat, pakar antropologi Indonesia dari Universitas Indonesia, mengelompokkan disiplin antropologi ke dalam dua bagian besar yakni antropologi biologi dan antropologi sosial. Dalam perkembangan selanjutnya kelompok antropologi sosial itu menjadi antropologi sosial budaya.

Dalam konteks implementasi kebijakan bela negara, antropologi sosial budaya bersentuhan dengan ilmu pertahanan. Dalam penelitian ini, keduanya merujuk pada objek kajian yang sama, yaitu budaya Papua.

c. Teori kelompok etnis

T.H. Eriksen (2001:261) menulis bahwa *ethnic identity is further marked by the recognition from others of a*

group's distinctiveness and the recognition of common cultural, linguistic, religious, behavioural, as indicators of contrast to other groups. Pendapat Eriksen tersebut adalah bahwa kelompok etnis menjadi identitas pada tiap-tiap kelompok etnis yang satu terhadap kelompok etnis yang lain sekaligus menjadi faktor pembeda yang kontras. Dengan demikian, apabila ada satu individu dari kelompok etnis yang satu masuk ke dalam kelompok etnis yang lain akan sangat terlihat perbedaannya karena kelompok etnis sebagai identitas selamanya melekat pada individu (La Ode MD, 2012:36). Adapun Don Handelman (1977:187) sebagai salah seorang pakar di bidang antropologi dari Universitas Telaviv, Israel, membedakan empat tingkat perkembangan yang dilakukan di dalam komunitas budaya manusia sebagai berikut. "Definition of terms such as: type of ethnicity, ethnic network, ethnic association, ethnic community, which describe the types of organization corresponding to different forms of ethnic integration. The need to put them in a broader context, taking into account the political and economic development of a country". Jadi, jenis/tipe/kategori etnis, jaringan etnis, asosiasi etnis, komunitas/masyarakat etnis menggambarkan jenis organisasi yang sesuai dengan bentuk yang berbeda dari integrasi etnis. Kebutuhan untuk menempatkan mereka dalam konteks yang lebih luas, disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan politik dan ekonomi suatu negara. Jenis/tipe/kategori etnis, jaringan etnis, asosiasi etnis, komunitas/masyarakat etnis, penekanannya menjelaskan perbedaan yang tajam antara kelompok etnis yang satu terhadap kelompok etnis lainnya sebagai identitas. Integrasi etnis menjelaskan implikasi politik etnis yang menganjurkan identitas individu atau

kelompok etnis antara satu sama lainnya agar ditanggalkan manakala menyangkut kepentingan nasional.

d. Teori nasionalisme

Soekarno mengutip pandangan Ernest Renan dalam menjelaskan maksud nasionalisme. Menurut Ernest Renan (1823—1892), bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi dari dua hal, yaitu pertama rakyat dahulu harus bersama-sama menjalani satu riwayat; kedua, rakyat sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukan jenis (ras), bukan bahasa, bukan agama, bukan persamaan butuh, dan bukan pula batas negeri yang menjadikan bangsa itu. Beberapa pakar yang mempelajari masalah bangsa adalah Karl Kautsky, Karl Radek, dan Otto Bouer. Bouer mengemukakan pandangannya sebagai berikut "bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Nasionalisme itu ialah suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa! Keterangan tersebut telah diajarkan para pakar di atas. Mereka mengatakan bahwa rasa nasionalisme itu menimbulkan suatu rasa percaya diri, rasa yang perlu sekali untuk mempertahankan diri dalam perjuangan menempuh keadaan yang mau mengalahkan kita"(Soekarno, 1963:3-4). Nasionalisme Renann, Karl Kautsky, dan Karl Radek, Otto Bouer, dan Soekarno mengajarkan persatuan kekuatan sikap moral dan psikologis bagi seluruh bangsa menjadi satu kesatuan politik. Latar belakang kekuatan sikap moral dan psikologis itu adalah kesamaan nasib buruk dijajah oleh bangsa lain, senasib dan sepenanggungan, persenyawaan akal dan kekuatan, memiliki itikad yang sama untuk membebaskan diri dari penderitaan bersama menjadi yang lebih baik secara bersama-sama pula.

Sebagai implementasi teori nasionalisme dalam konteks Indonesia dari Renann, Karl Kautsky, dan Karl Radek, Otto Bouer, dan Soekarno adalah nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara (*state guard*) menurut Dirjen Potan Kemhan (2010:29-34) yang diterbitkan dalam bentuk Naskah Bahan Ajar Pembinaan Bela Negara, terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela Negara (Bahar, 2010:2-3). Nilai-nilai bela negara itu, harus dimiliki dan dilakukan semua warga negara Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari.

HASIL PENELITIAN

Pengolahan data primer yang ditemukan di lapangan meliputi persoalan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, berdasarkan proses dan prosedur *grounded theory*, berikut disajikan data lapangan yang dideskripsikan secara tematik dan objektif, yang diklasifikasikan ke dalam tiga tema pokok, yakni (a) politik NKRI versus politik abolisi, (b) pemberdayaan masyarakat, dan (c) kemanan dan pengamanan perbatasan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Politik NKRI vs Politik Abolisi

Tema ini diangkat dari pernyataan, pendapat, tanggapan, dan kritik dari beberapa tokoh OPM dan pejabat di Papua, yaitu Stanley, Enitan, Terryanus, Jeffry, Pangdam XVII/Cenderawasih, Danrem Merauke, Danramil Keerom. Mereka mengatakan politik NKRI direfleksikan sebagai koreksi terhadap perilaku pejabat pemda Papua yang justru mencederai nilai-nilai NKRI itu sendiri sebagai bagian dari nilai Bela Negara. Ilustrasinya yang begitu fenomenal dipertontonkan di tengah masyarakat Papua,

termasuk OPM, sehingga dijadikan alasan utama bagi OPM mengapa mereka masuk hutan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Beberapa Pendapat Tokoh di Papua

“Sekarang kita tidak cerita lagi tentang sejarah, sudah tidak cerita lagi soal pembangunan yang baik atau buruk, dan soal ekonomi. Sekarang kami mau cerita bagaimana kita harus bebas dari Indonesia. Bukan kemiskinan, tapi bagaimana kami harus bebas dari Indonesia! Itu tujuan kami! Jadi, untuk sekarang, kita bukan membutuhkan Anda yang sudah magister datang ke sini, untuk membangun.” Dari *sononya* saja, *kan sudah gini*”. Kami sudah tidak butuhkan lagi itu, karena sejarah 50 tahun itu jadi menderit. Ingat dari tahun 1962 sampai dengan hari ini kami sudah tidak membutuhkan sarjana dari manapun yang datang untuk membangun kita untuk maju, misalnya pembangunan dari ekonomi dan lain-lain. “Kita sudah tidak membutuhkan itu lagi” (Hasil wawancara dengan ketua dewan adat Papua, Stanley Gibsy, 23 Juli 2012, bertempat di rumah kerabat Stanley). Papua ini dibangun dalam kerangka politik, bukan kerangka ekonomi pemberdayaan yang seharusnya. Dalam rangka politik, memperkuat eksistensi Papua dari fisik mental ke Republik Indonesia yang sebenarnya. Hal itu dapat dijelaskan dengan adanya kehadiran transmigrasi, kawin campur, dan sebagainya. Semua itu bertujuan untuk menghilangkan pemahaman dan paham Papua. Realitas sosial itu terjadi di seluruh Papua atau dengan perkataan lain terjadi dimana-mana. Akan tetapi, yang harus diketahui bahwa tanah ini diberkati oleh Allah, dan disertai juga oleh Allah, dan juga tertulis dalam kitab suci, mungkin juga ada di Al Quran, bahwa bangsa manusia yang paling terbelakang adalah Papua. Tetapi bangsa yang akan terkemuka adalah bangsa Papua. Jadi kita sadar bahwa kami bangsa yang terbelakang, tapi nanti yang paling terkemuka. Kami lebih banyak di Papua ini

mayoritas Kristen, jadi kami paham akan keyakinan itu, sehingga Indonesia dia tawarkan dengan berbagai macam program, sampai saat ini belum menyentuh keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Tapi Belanda lima tahun di Papua, dari tahun 1953 sampai 1958, mereka menerapkan sistem yang berbeda dari Indonesia, jadi yang bisa masuk SD saingannya 1 banding 1000 (hasil wawancara dengan Stanley Gibsy, 23 Juli 2012). Terryanus Israel Yoku dan Jeffry menyatakan pandangannya sebagai berikut “politik abolisi adalah model resolusi konflik politik vertikal yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik politik vertikal bangsa Indonesia dan bangsa Papua, karena politik abolisi memuat dua kekuatan *soft power* yang didahulukan dan *hard power* yang dinomorduakan. Mekanisme politik abolisi itu secara singkat bermula dari seorang di antara tokoh elit OPM yang menginginkan politik abolisi dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian abolisi dari Presiden Republik Indonesia itu dipergunakan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Papua (misalnya, Gubernur Papua, Bupati Merauke, atau Walikota Jayapura). Untuk proses pencalonannya melalui seleksi partai politik. Akan tetapi, proses pemilihannya adalah rakyat secara langsung. Pemberi rekomendasi adalah MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Pertimbangan Rakyat Papua) sebagai jaminan bahwa mantan pimpinan separatis itu tidak akan mengulangi perbuatannya untuk melawan NKRI. Kemudian, ketika dia sudah bersih, dia dicalonkan sebagai gubernur, bupati, atau walikota. Apabila eks OPM yang mengambil alih kepemimpinan di Papua, jika dibandingkan dengan keberhasilan pemimpin yang non-OPM, pasti kepemimpinan eks OPM akan lebih bagus dari hasil kepemimpinan yang non-OPM. Pemimpin Papua yang eks OPM belum pernah melakukan kesalahan, kejahatan, sehingga tidak mungkin dia melakukan penyelewengan, karena pasti ditentang oleh OPM. Itulah sebabnya mengapa OPM masuk

hutan untuk melawan pemerintah RI, karena kami melihat pemerintah mengkhianati kami. Jadi, dalam menjalankan roda kepemimpinannya dia akan menanamkan kepercayaan dulu kepada yang memberikan abolisi (presiden RI). Dia akan pegang itu dan dia tanamkan kepercayaan kepada rakyat Papua. Jadi, hasil kepemimpinan eks OPM kami perkirakan pasti akan lebih baik lebih adil, lebih jujur, dan kebenaran serta kesejahteraan rakyat Papua dia akan raih (hasil wawancara dengan ketua dewan adat Papua, Stanley Gibsy, 23 Juli 2012)”. Selanjutnya, Jeffri mengemukakan, “jika Bapak Terryanus percayakan saya untuk bertemu Presiden RI, saya laksanakan. Masalah perbatasan kita bicarakan dengan baik. “Selama kita buka televisi, TPN (Tentara Papua Nasional) OPM dengar”. Kalau saya perintahkan TPN keluar dari hutan, mereka keluar, mereka mencari siapa yang bisa bertanggung jawab. Kami sudah koordinasikan dan bicarakan. Demikian juga rakyat akan berkumpul di tempat. Kalau saya tipu, di sini ada orang tua. Kami bukan separatis. Yang kami tantang selama ini, dan kami tidak patuh karena pemerintah keluar dari aturan, selama inikan kami pelajari semua kebijakan Pemerintah Papua dan RI. Kalau Pemerintah jujur, siapa yang berani menantang (hasil wawancara dengan pendeta Terryanus Israel Yoku, Preskongres OPM, bertempat dikediamannya di Sentani, 27 Juli 2012).” Selanjutnya Jeffri mengatakan “yang agak berat buat saya adalah pertimbangan harus menerima empat pilar kebangsaan Indonesia lebih dahulu, yakni Pancasila, NKRI, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Keputusan itu tidak bisa diambil oleh seseorang untuk mendapatkan kepercayaan dari sekian banyak rakyat Papua untuk memberikan dukungan. Agak susah. Karena kata kunci yang akan menjadi dasar sukses kepemimpinannya adalah terlebih dahulu dia melepaskan idealismnya. Perlu ditambahkan sedikit, justru abolisi yang tidak dimengerti oleh pemerintah. Makanya rakyat menantang untuk memisahkan diri (hasil wawancara

dengan Jeffri, Komandan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM, 27 Juli 2012, di kediaman Terryanus Israel Yoku, di Sentani)". Terryanus menambahkan penjelasannya, bahwa "gambaran akan adanya hambatan pelaksanaan politik abolisi itu memang belum pernah terjadi karena belum pernah dicoba untuk dilaksanakan. Namun, menurut saya yang menjadi syarat berat buat saya adalah harus membuat satu pernyataan menerima empat pilar kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini akan menyebabkan jawaban rakyat tidak memberikan dukungannya, karena rakyat pada umumnya mau merdeka. Kalau saya menyatakan sikap seperti itu, saya hanya mendapatkan abolisi saja. Untuk membayar harga itu bukan gampang"(hasil wawancara dengan pendeta Terryanus Israel Yoku, Preskongres OPM, bertempat dikediamannya di Sentani, 27 Juli 2012). Jeffri juga menambahkan "pemberlakuan politik abolisi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai resolusi konflik vertikal dengan RI-OPM memang merupakan 'pilihan jalan lurus'. Karena kemungkinan untuk diterima sangat besar. Sudah saya pikirkan itu, seandainya pemerintah bisa percaya seperti saya. Percayakan dana, rakyat saya kasih pengertian seluruhnya untuk mencapai kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah mereka. Saya pimpin rakyat saya untuk mencapai taraf hidup itu. Bahwa barang ini kamu punya, kerjakan. Saya tidak gentar". Terryanus sangat yakin sekali bahwa dia bisa membimbing rakyat. "Berikan pengertian kepada mereka, dan mereka mulai kerja" (hasil wawancara dengan Jeffri, Komandan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM, 27 Juli 2012, di kediaman Terryanus Israel Yoku, di Sentani). Adapun pandangan Pangdam XVII/Cenderawasih tentang kebijakan pemerintah sebagai cerminan Politik NKRI, adalah sebagai berikut. "Tampaknya pemerintah sudah benar, yaitu ada Otsus yang diikuti dengan realisasi kebijakan anggaran belanja. Akan tetapi, persoalannya bagaimana merealisasikan

anggaran itu. Faktanya setelah sebelas tahun, mulai tahun 2001 s.d. 2012 tidak ada yang pernah tahu bagaimana memecahkan masalah demi masalah pembangunan di Papua. Salah satu contoh di Timika, di sana ada *Freeport* yang dari tahun 1960-an, sampai sekarang, ada dana CSR yang 1%, namun itu ke mana? Kebijakan Pemerintah Pusat sudah tepat, namun implementasi kebijakan tersebut di daerah dipertanyakan, para birokrat di Papua ternyata belum cukup mapan untuk mengemban tanggung jawab yang besar dan berat yang diamanahkan. Hal itu terutama dialami oleh para pemimpin seperti gubernur, bupati, dan walikota di Papua. Kelemahan utamanya terletak pada manajerial keuangan dan perencanaan pembangunan yang bersumber dari kedua belah pihak birokrat dan pemimpin itulah yang menjadi sumber utama ketidakjelasan fungsi Otsus di Papua. Akibatnya masyarakat Papua tidak bisa menikmati manfaat percepatan pembanguana dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat Papua sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan otsus. Jalan keluar, salah satunya, mungkin caranya harus ada pendampingan, jangan lepas mereka berjalan sendirian. Jadi, hal ini adalah masalah besar, menurut saya ini penelitian ini perlu difokuskan kepada masalah besar ini. Itu baru bisa ditemukan yang seharusnya, dalam arti bisa mendapatkan substansi masalah yang sesungguhnya" (Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Erwin Syafitri, Makodam XVII Cendrawasih, Jayapura, 24 Juli 2012). Selanjutnya beliau mengatakan "selama ini yang sering terjadi adalah ancaman, yang seolah dibuat timbul tenggelam karena kepentingan politik. Jadi, ini kalau permainan politik berhenti, kami juga akan berhenti. Masyarakat kita hitung bodoh saja. Sejak kebijakan otsus di berlakukan sini sejumlah trilyun per tahun. Kemana uang itu? Harusnya yang mengelola, kepala pemerintahan dengan DPR. Nah, kepala pemerintahan ke mana, DPR-nya ke mana? Ya uangnya ke mana? Nah, maunya itu yang turun kemari, benar tadi Wakil Ketua DPR. Jangan takut

KPK turun ke Papua. Papua mau merdeka, tidak usah takut. Kita tadi malam ketemu juga dengan unsur Muspida, ngomong-ngomong juga tentang itu. Jadi, kalau itu betul otsus dengan anggaran yang luar biasa besar dibanding dengan dana-dana yang yang digelontorkan di daerah lain, benar itu direalisasikan, tidak ada kepentingan-kepentingan, kita ini latihan saja kerjanya. Kita itu tidak memikirkan hal seperti itu. Seperti di Puncak Jaya kelompok mereka dibawa, kelompok bersenjata dibawa, Pilkada kelompok suku dibawa untuk memenangi Pilkada. Kalau sudah tidak ada makanan mereka keluar lagi” (Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Erwin Syafitri, Makodam XVII Cendrawasih, Jayapura, 24 Juli 2012). Selanjutnya pendapat Pangdam XVII/Cenderawasih tentang kinerja pejabat Pemda dan pengelolaan dana CSR. “Menurut saya itu harus ada pendampingan, jangan lepas mereka berjalan sendirian. Pendampingan itu mutlak diperlukan, supaya pembangunan bisa berjalan, *gitu lho*. Satu hal di Timika, Timika itu di *Freeport* dari tahun berapa 60-an, sampai sekarang, dana CSR yang 1% itu ke mana? Sampai sekarang kita tidak tau. Untuk masyarakat? Coba yang orang Papua asli siapa? Ditanyakan bahwa kamu tahu tidak ke mana yang 1% itu? Mereka pasti akan menjawab tidak tahu” (Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Erwin Syafitri, Makodam XVII Cendrawasih, Jayapura, 24 Juli 2012). Pernyataan Pangdam XVII / Cenderawasih terkait dengan keberadaan para pejabat pemda dalam wilayah tugasnya, beberapa data temuan sebagai berikut. “Bupati Oksibil jarang masuk, mungkin Bupati sudah memberikan beberapa kewenangan kepada Sekda, sepertinya terdapat kelainan di Oksibil, ketika bupatinya pulang dan masuk kantor selalu pusing. Bupati akan “diserbu” oleh masyarakatnya untuk meminta dana ke rumah bupati untuk keperluan yang antara lain seperti untuk pembuatan kandang babi sampai pada keperluan melahirkan. Kadang-kadang, mereka memalang jalan bupati untuk

meminta dana, yang bentuknya surat perorangan. Jadi, mungkin Bupati hanya pulang kalau ada urusan yang sangat penting...”, “bagaimana Bupati bisa membangun daerahnya dengan baik jika sering tidak masuk. Meskipun sebagian kewenangan penting bupati sudah diserahkan kepada Sekda, namun sejauh mana kemampuannya untuk menyamai peran bupati langsung? *Decision maker*-nya siapa? Wakilnya juga tidak tahu berada di mana? Lalu saya tanyakan tentang keberadaan wakil bupati kepada salah seorang bupati, jawabnya terkait dengan otda, undang-undang otonomi daerah yang buat, siapa yang menciptakan? pusat lagi yang disalahkan” (hasil wawancara dengan Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Erwin Syafitri, Makodam XVII Cendrawasih, Jayapura, 24 Juli 2012). Danrem Merauke menyampaikan pandangannya tentang pentingnya pejabat pemda ada di wilayah tugasnya, berikut pernyataannya “Saya Danrem dan beliau Danlantamal, kita mau menyatukan konsep di palagan 1 saja itu tidak gampang, karena kami tentu berorientasi kepada matra kami masing-masing, tidak salah kan, karena beliau memegang komando TNI AL, saya memegang komando dari unsur TNI AD. Di sinilah letak keharusan kepala daerah sebagai unsur muspida berada di wilayahnya, sebagaimana telah diamanatkan di dalam UU 58. Saya berpendapat bahwa kepala daerah mestinya punya konsultan, untuk membuat *grand design*-nya, bahwa pembangunan diintegrasikan dengan konsep pertahanan” (hasil wawancara dengan Danrem Merauke, bertempat di ruang kerja Danrem, Makorem, di Merauke, 24 Juli 2012). Sementara menurut Stanley, “Secara umum yang lebih bagus menurut realitas sosial-budaya di sini adalah petugas SKPD atau petugas yang membina koperasi yang sebaiknya bisa betah di sini dan melatih, membina, mendidik warga setempat. Meskipun disadari sepenuhnya bahwa mendidik orang di sini (Papua) tidak mudah, karena telah terbiasa hidup dengan alam lingkungan secara apa

adanya. Sementara sekarang perkembangan teknologi sudah sangat pesat, tentu orang Papua tidak mampu mengejar perkembangan teknologi itu. Untuk itu perlu ada orang-orang yang setiap hari dapat membina dan melatih mereka dengan penuh kesabaran sampai mereka mandiri dan bisa dilepas secara perlahan. Tetapi kalau hanya kita buang uang, kita berteori, bisa saja, tapi setelah pulang habis juga teorinya. Jadi, kalau memberi uang seyogyanya ditopang dengan pelatihan. Program pembinaan seperti itu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat....”; “...pemerintah dalam hal ini bupati, harus menyiapkan dana serta sarana dan prasarana pendidikan melalui APBD atau dana otsus. Dana otsus untuk pendidikan sebesar 15%. Dana sebesar 15% itu untuk Papua seluruhnya, dan dari 15% itu dibagi ke kabupaten. Merauke ini siswanya cukup tinggi, yang terdiri dari beberapa perguruan, mulai dari SD, SMP, SMA, ada ratusan. Peserta anak didiknya ada puluhan ribu. Untuk perguruan tinggi terdapat enam perguruan tinggi yang sudah ada dan beroperasi sejak lama” (hasil wawancara dengan Stanley Gibsy, 23 Juli 2012). “Seperti waktu ada penembakan kepala desa itu, malahan adat di situ menuntut ke OPM. Justru OPM yang malah takut dengan hukum adat di situ. Jadi, kalau untuk membunuh mereka yang pribumi, mereka takut hukum adat (hasil wawancara dengan Danramil Keerom, di kabupaten Keerom, 27 Juli 2012). Satu contoh di antaranya adalah kasus Jeffri seorang komandan Kombatan OPM sangat mematuhi peringatan dari Enitan sebagai unsur ketua adat di Jayapura. Enitan mengatakan “Eeeehhhh.... Jefri! Kotidak boleh turun demo! Kalau turun demo, kepalamu akan hilang... Dengar itu!!! Ya mama, jawab Jefri!” Takutnya OPM pada hukum adat bukan tanpa alasan. Pertama, jika OPM melanggar hukum adat, dia tidak mempunyai cukup uang untuk membayar hukum adat atas pelanggaran. Kedua, OPM melanggar hukum adat dan kemudian mampu membayar hukum adat,

konsekuensinya OPM tidak akan mendapatkan dukungan perjuangannya dari rakyat Papua khususnya yang bermukim di wilayah perbatasan. Hal itu akan melemahkan perjuangan OPM (hasil wawancara dengan ibu Enitan, di kediaman Terryanus Israel Yoku, 27 Juli 2012). “Apabila eks OPM yang mengambil alih kepemimpinan di Papua, jika dibandingkan dengan keberhasilan pemimpin-pemimpin yang non-OPM, pasti kepemimpinan eks OPM akan lebih bagus dari hasil kepemimpinan yang non-OPM. Pemimpin-pemimpin Papua yang eks OPM belum pernah melakukan kesalahan, kejahatan, sehingga tidak mungkin dia melakukan penyelewengan, karena pasti ditentang oleh OPM. Itulah sebabnya mengapa OPM masuk hutan untuk melawan Pemerintah RI, karena kami melihat pemerintah mengkhianati kami. Jadi, dalam menjalankan roda kepemimpinannya dia akan menanamkan kepercayaan dulu kepada yang memberikan abolisi (Presiden RI). Dia akan pegang itu dan dia tanamkan kepercayaan kepada rakyat Papua. Jadi, hasil kepemimpinan eks OPM kami perkirakan pasti akan lebih baik lebih adil, lebih jujur, dan kebenaran serta kesejahteraan rakyat Papua dia akan raih” (hasil wawancara dengan pendeta Terryanus Israel Yoku, Preskongres OPM, bertempat di kediamannya di Sentani, 27 Juli 2012).

b. Pemberdayaan Masyarakat.

Pernyataan Pangdam XVII terkait dengan pemanfaatan besi tua dalam rangka pemberdayaan masyarakat. “besi tua itu, bagus diberdayakan untuk kesepakatan dua suku besar, yaitu Ambune dan suku Kamoro bergantian, tapi lama-lama bergeser. Ini cuma dijadikan objek. Wah, ini kita dari suku ini. Jadi, yang punya uang yang masuk, yang tidak punya tidak masuk. Saya coba mencampuri, saya bilang sama yang punya *Freeport*, “Besi itu, sudah langsung saja dikapalkan dan dijual ke Krakatau Steel. Setelah ada uangnya, tanyakan kepada masyarakat tentang penggunaan uang

tersebut. Jadi, harus terbuka, misalnya akan dipergunakan untuk jalan untuk kepentingan kesejahteraan bersama, ataubuat sekolah dsb. Ini artinya apa? Semua aparat pemerintah dengan perangkatnya harus berjalan dengan sistem yang ada” (hasil wawancara dengan Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Erwin Syafitri, Makodam XVII Cendrawasih, Jayapura, 24 Juli 2012). Adapun Pandangan Jeffri tentang pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. “Kami pelajari di sistem pendidikan. Seperti yang sekarang kita lihat, aturan ini tidak pernah dijalankan oleh Pemerintah. Ini yang ditantang oleh TPN OPM. Kami semata-mata diboikot dengan kepentingan politik. Padahal tujuannya itu benar. Sementara kita menantang dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sikap Pancasila. Sementara pemerintah dari gubernur, bupati, sampai distrik, kampung-kampung memakai Garuda. Dasar keadilan sosial belum dijalankan oleh pemerintah. Dana respek 100 juta satu tahun dipakai hanya untuk pembangunan fisik. Apa itu sepaham dengan rakyat punya kemauan? dana dipakai untuk kepentingan kelompok. Uangnya di bawa kemana-mana, sedangkan pengajuan pemerintah lewat APBD dan APBN itu, menurut kami adalah atas nama rakyat, kemudian uang datang. Rakyat hanya menonton. Uang ini dikemanakan? Ini yang tidak adil” (hasil wawancara dengan Jeffri, Komandan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM, 27 Juli 2012, di kediaman Terryanus Israel Yoku, di Sentani). “Apakah dia tahu apa maknanya *Bhinneka Tunggal Ika*? walaupun berbeda-beda kita satu moyang dari Abraham. Kami tidak bisa mendiamkan, ini politik. Kami bukan bicara masalah mau merdeka. Dulunya saya punya pengalaman Papua merdeka, “Saya perjuang sampai sana”. Setelah itu kami punya mendapatkan pengalaman mendasar. Ada petunjuk dari yang mengikat dari Sabang sampai Merauke adalah keadilan sosial. Dari sekarang berbicara ini pemerintah tidak mampu, tidak ada fungsinya, karena nilai adat disembunyikan. Pemerintah keluar dari jalur,

kami menantang pemerintah untuk menyatakan kemerdekaan itu dalam Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Karena pemerintah ini, harus ditentukan oleh masyarakat dasar pengambilan kebijakan publiknya. Pikirannya dulu harus dicocokkan dengan masyarakat. “Kau bisa atau tidak?” kalau bisa, kita antar ke Presiden meminta pengampunan/abolisi. Betul-betul kau mengerti tentang *Bhinneka Tunggal Ika*? wilayahnya? “kalau tidak mengerti, belajar dulu! karena itu bukan sembarangan itu!” sebab dari itu biasanya rakyat yang tersesat. Rakyat yang memilih akhirnya tidak menjalankan kewenangan, akhirnya rakyat menantang lagi. Kemudian tentang konflik yang terjadi terakhir itu, cara bekerja mereka mungkin mencari bisnis/ekonomi. Ada perjanjian sana dan sini. Jadi diciptakanlah konflik horizontal dan sebagainya (hasil wawancara dengan Jeffri, Komandan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM, 27 Juli 2012, di kediaman Terryanus Israel Yoku, di Sentani)”. “Pihak yang menciptakan itu setahu kami selama ini jalurnya tentara dan polisi sampai di Jakarta. Kami tidak bisa sebutkan namanya tetapi pasti benar adanya. Jenjang kepangkatan di TPN itu ada tapi tidak perlu diceritakan di sini. Sekarang kita terbatas untuk jalur hubungan nasional. Hubungan nasional itu yang dahulu kita bicarakan untuk membangun dari kepulauan ke timur suku Tabi ini” (hasil wawancara dengan pendeta Terryanus Israel Yoku, Preskongres OPM, bertempat dikediamannya di Sentani, 27 Juli 2012). “Dewasa ini, kaum intelektual OPM banyak yang memilih bergerak di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui jalur diplomasi politik di tingkat internasional. Kemajuan yang dicapai para intelektual OPM di luar negeri itu, menjadi ancaman nyata bagi NKRI bahwa Papua akan lepas dari Indonesia, kemudian menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri”, “Sebesar 89% kemajuan saya, karena Belanda mempunyai cara pendidikan, cara membentuk manusianya dimulai dari balita sampai usia

10 tahun”. “Artinya saya ini dibina oleh Belanda sejak SD dan saya ini bukan sarjana, saya ini SD (Sekolah Rakyat: SR), tetapi saya lebih pintar dari orang universitas”. “Jadi, sejak balita Belanda sudah sortir, Belanda mulai membentuk fisik sampai sikapnya”. “Jadi, waktu sekolah itu sudah siap, tidak seperti sekarang yang di katrol kualitasnya”. “Saya dibina oleh Belanda mulai dari makan, istirahat, tidur, sampai bekerja. Setiap hari saya selalu bangun jam 5, itu sudah diatur dari kecil oleh Belanda. Begitu juga cara makan, saya harus istirahat dengan cepat. Di sana saya dibina oleh misionaris selama tiga tahun”. “Saya cerita satu contoh, pada tahun 1962, saya jadi anak piara di Belanda, tiap hari mengiris bawang, berangkat dari rumah hanya pakaian di badan, semua sudah di urus di kapal di Belanda. Segala keperluan seperti handuk sudah ada dan roti juga sudah ada di kapal. Di Belanda saya tinggal di asrama selama dua tahun. Belanda memiliki sistem pembentukan tubuh, jam tidur diatur, istirahat diatur, dan makan diatur, dan lain sebagainya”. “Setelah itu dia kasih tahu 1+1. Dia bentuk dulu manusianya, baru belakangan menyusul 1+1”. “Jadi, kualitas Belanda lebih baik dari kualitas Indonesia”. “Disiplin Belanda lebih baik dari disiplin Indonesia. Artinya saya ini bukan orang perguruan tinggi, saya hanya berpendidikan SD, tetapi cakrawala dan kemampuan saya seperti orang-orang dari lulusan perguruan tinggi, dan memang saya tahu sistematis perguruan tinggi”. “Saya tugas di staf kantor bupati selama 35 tahun. Staf KTU dimana klasifikasi nomor surat, perbedaan surat menyurat, perbedaan bahasa surat, penerimaan segala UU dari Republik, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Sistem penyimpanan arsip negara, dan klasifikasi surat-menyurat saya hafal di luar kepala semua”. “Saya ini ketemu orang Jakarta biasa saja, ketemu SBY pun biasa saja”. “SBY tahu kondisi Papua dari saya, dan saya ini tim suksesnya SBY, dan SBY menang di Merauke”. “Saya orangnya, hanya saja sampai saat ini SBY belum pernah kasih saya

sesuatu”. “Saya juga mau katakan bahwa, seluruh Indonesia lebih senang kalau saya berdiskusi dengan mereka, karena gaya saya menyentuh permasalahan bangsa Indonesia di Papua”. “Dari aspek sosiologi, bahwa rata-rata negara jajahan barat yang berada di Asia dan Afrika, memiliki keterbelakangan psikologis. Pertama, mentalnya berorientasi kepada bangsa penjajah masih kuat. Kedua, mentalitas inovatifnya lamban dan cepat puas atas hasil yang telah dicapainya. Ketiga, kejujurannya pada umumnya masih relatif rendah. Tidak seperti di negara kolonial, sistem rekrutmennya masih sangat ketat dan objektif” (hasil wawancara dengan ketua dewan adat Papua, Stanley Gibsy, 23 Juli 2012, bertempat di rumah kerabat Stanley). Di Papua adat menjadi dewan suatu institusi yang dibentuk oleh orang Papua untuk mengakomodasi seluruh warga, tumbuhan, hak, dan lain-lain yang ada di bumi Papua. Dewan Adat Papua adalah suatu kebiasaan, bangunan, tanah, rumah, dan lain-lain. Suku-suku di Papua dan PNG kurang lebih berjumlah 3.000 suku. Menurut penelitian SIL, di Papua, terdapat sekitar 250 lebih bahasa. Di sepanjang perbatasan didiami oleh berbagai suku yang berbeda-beda. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan PNG, suku-suku tersebut menjadi satu, inilah Indonesia. Meskipun demikian, kondisi psikologis suku-suku di perbatasan Papua-PNG akan berpandangan keliru atau terjadi bias, bila tidak dipahami struktur budayanya. Suku-suku tersebut sudah terdaftar di PBB sebagai suku pribumi/*indigenous people*. Organisasi lain yang tercatat pula di PBB adalah AMAN (Aliansi Masyarakat Nusantara). Jadi, kebenaran harus tetap disuarakan khususnya kepada masyarakat Papua dan umumnya para pendatang. Dia sudah beli tanah dan sudah hak milik, kita punya kewajiban untuk melindungi hal tersebut. Bukan organisasi politik, dan kita terdaftar di PBB, sebagai legalitasnya. Di Kesbang tidak tercatat, kita hanya tercatat di PBB. Kita kepada pemerintah bahwa keberadaan Dewan Adat Papua sebagai mitra pemerintah, dan kita

tidak dibiayai oleh pemerintah. Kita tetap melindungi dan menjaga pembangunan agar tetap jalan, betul-betul pembangunan untuk masyarakat, bukan buat siapa-siapa. Baku tipu nomor 1, hanya untuk merebut lahan rakyat hanya dibayar 1 juta, 1 milyar, tapi setelah uang habis, mereka melarat. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang pertahanan dalam konteks perbatasan, barangkali pendekatan kebudayaan menjadi hal yang sangat penting. Karena ada hubungan kekerabatan dan hubungan darah antarsuku yang ada di perbatasan yaitu suku yang ada di PNG dan Papua. Misalnya warga negara Indonesia yang ada di kampung Topati, Enggros, Nafri, yang ke arah PNG, mereka itu semua berasal dari PNG. Karena ada hubungan kekerabatan tadi, maka ada hari tertentu, mereka selenggarakan pesta rakyat adat di sana. Mereka akan pergi ke sana dan mereka pakai kartu lintas batas tradisional warna merah. Lalu mereka juga punya hak atas tanah di PNG, yang di PNG juga punya hak tanah di daerah Papua. (hasil wawancara dengan ketua dewan adat Papua, Stanley Gibsy, 23 Juli 2012, bertempat di rumah kerabat Stanley). Berkaitan dengan hal di atas, menurut Dewan Adat Papua perlu diperhatikan dua faktor, yaitu *Pertama*, mempertahankan nilai budaya dengan batasan adat yang jelas. Jadi, tidak dilihat dalam *ansich*, bahwa harus ada pertahanan dalam bentuk mendirikan pos, serdadu, senapan, dan sebagainya; dan *kedua*, pertahanan dalam pengertian bahwa harus tetap terjalin hubungan emosional kekeluargaan, bahwa “dia” ada di PNG tetapi juga “dia” ada di Indonesia. Di samping itu, menurut wakil ketua MRP faktor perbatasan perlu diperhatikan pula, rakyat Papua harus melihat dari utara dan selatan. “Papua di Keerom dengan Skouw di arah sana, dan di Sota di Papua Selatan, dan di Merauke. Ini mesti dilihat dalam satu kesatuan secara utuh. Itu artinya kita juga menjaga perbatasan dengan Australia sekaligus”. Lebih lanjut wakil ketua MRP pun menjelaskan kendali dengan wilayah ini dan pendekatan, apabila tidak

baik, akan menjadi masalah. Konflik tapal batas, jangankan antarnegara, antarkabupaten di Papua sekarang sering terjadi konflik tapal batas. Hal itu disebabkan pada pembentukan kabupaten/kota tidak melihat hubungan kekerabatan dan ulayat untuk masing-masing etnis.

Dalam kerangka yang lebih luas, bila kita berbicara tentang bagaimana membangun hubungan antaretnis, meskipun pasti sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, strateginya adalah melakukan *review* kembali untuk melihat hubungan yang semakin intens berkaitan dengan pembangunan mengingat semakin banyak orang PNG yang datang. Sebaliknya, banyak orang Papua yang pergi ke PNG. Bila terdapat perasaan tidak nyaman di Indonesia, pasti orang Papua akan lari ke PNG, begitu menurut penuturan wakil ketua MRP.

Dari wawancara Sobar Sutisna (peneliti Unhan) dengan peneliti Universitas Gajah Mada (UGM), Ir Agus Affianto (AA), yang pernah bertahun-tahun melakukan upaya pemberdayaan masyarakat adat Papua, diperoleh fakta sebagai berikut.

AA menjelaskan ketika ia disertai program untuk pemberdayaan rakyat Papua yang masih dikategorikan belum sejahtera dan secara ekonomi terbelakang, ia memilih satu kelompok suku Meno di Kabupaten Mimika, Papua. Suku tersebut hidupnya sangat sederhana, cara berpikirnya sederhana. Mereka tidak banyak menuntut. Mereka sering dijadikan obyek penelitian dan sasaran program pemberdayaan masyarakat, tetapi pada kenyataannya hidup mereka tetap tertinggal. Kebetulan AA berlatar belakang pertanian, ia melihat pola bertani mereka masih sangatlah sederhana, atau masih dapat dikatakan “primitif”. Suku tersebut mencukupi kebutuhan dasar pangannya dengan bercocok tanam. Mereka memiliki kebiasaan menanam umbi-umbian, memotong dan mengolah pohon sagu, berburu binatang untuk mendapatkan daging untuk dimakan. Pakaian dan ornamennya mereka peroleh cukup dengan memanfaatkan apa yang ada di

sekitar tempat tinggalnya, yaitu kulit kayu, batang kayu, dan memanfaatkan kulit, tanduk, dari binatang hasil buruannya. Singkatnya, kebiasaan mereka adalah mendulang dan meramu dengan cara-cara yang sangat sederhana atau “primitif”. Dalam kegiatan bercocok tanam, tak pernah ada, dalam pikiran mereka untuk tujuan lain. Hasil bumi cukup digunakan untuk barter dengan jenis hasil bumi lain yang mereka butuhkan. AA melakukan pendekatan ke perkampungan suku Meno dengan memperkenalkan diri sebagai seorang petani. Ia mulai dengan mencermati cara-cara bagaimana mereka bercocok tanam dan memanennya lalu melakukan pendekatan kepada kepala suku dan berdialog menggunakan bahasa Indonesia. Setelah berbulan-bulan berada bersama suku Meno, dari masa tanam sampai masa panen, dapat diketahui bagaimana suku tersebut berjuang mempertahankan hidup dan kehidupannya melalui bertani yang sangat sederhana itu. AA mempelajari pola bertani yang dilakukan dan mencari referensi tentang bagaimana bisa memengaruhi mereka untuk dapat lebih produktif dan meningkatkan taraf hidupnya. Hingga suatu saat diperoleh keakraban yang tulus dari mereka. Mereka pun mulai terbiasa berdialog dengan AA. Mereka tidak mencurigai kehadiran Agus sebagai orang asing yang tidak mereka inginkan. Kemudian, melalui kepala suku, yang dalam pranata sosial mereka sangat dipatuhi dan disegani sebagai kepala adat, disampaikan sebuah pembelajaran “mengelola hasil panen” dengan memperkenalkan sistem jual-beli di pasar, mereka pun senang menerimanya. Akhirnya, suku Meno mengenal uang yang bernilai ekonomi sebagai hasil keringat ketimbang sebuah pemberian atau *charity*. Mengenal mata uang rupiah tentu menjadi bagian dari bela negara. Pada mulanya uang yang mereka peroleh dihabiskan untuk membeli kesenangan terutama minuman dan mabuk. Ternyata, tidak sulit memperkenalkan belajar menyimpan uang dari sebagian hasil panen kepada kepala suku. Mereka dapat membatasi

pemakaian untuk konsumsi 50% dan 50% lainnya ditabung. Dengan mudah mereka pun mengikuti saran untuk menyimpan sebagian uang dari hasil penjualan panennya. Apa yang terjadi kemudian? Sungguh luar biasa, mereka taat menyimpan sebagian uang dari hasil panennya, jumlahnya sampai jutaan. Mereka senang dan kemudian mengangkat AA menjadi “anak” kepala adat. Suatu waktu kepala adat secara sukarela memberikan uang simpanannya kepada AA, dengan pertimbangan AA adalah “anak” mereka. AA tidak ingin mengecewakan mereka, uang itupun diterimanya, tetapi kemudian dibelikannya sebuah sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan suku Meno. Setelah beberapa tahun, hal seperti itu berlangsung terus, akhirnya dari tabungan tersebut mereka pun mampu membeli kendaraan roda empat yang dapat digunakan untuk mengangkut hasil panennya. Selanjutnya, dengan bergotong-royong mereka melebarkan jalan setapak dari kampung menuju pasar sehingga jalan itu bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Ada satu catatan yang menjadi pertanyaan AA, ketika pada suatu hari ada pejabat Pemda datang ke kampung suku Meno, dan menawarkan berbagai program sosial dan bantuan pemberdayaan dengan jumlah alokasi uang yang cukup besar, ternyata suku Meno dengan tegas menolak tawaran itu. Mereka menyuruh pejabat itu kembali karena mereka tidak percaya pada tawaran pejabat tersebut. Hal itu terjadi kemungkinan mereka pernah dibohongi sebelumnya. Suku Meno tidak mudah percaya pada janji pejabat pemda, mereka lebih menghargai kerja dan bukti nyata.

c. Keamanan dan Pengamanan Perbatasan.

Pangdam XVII/Cendrawasih menjelaskan baru-baru ini seorang senator Amerika Serikat yang sedang berkunjung ke Yogyakarta menanyakan masalah keamanan di Papua, “Saya katakan silakan datang pada malam hari jam 23.00 WIT atau 24.00 WIT.

Pulang ke rumah jam 03.00 WIT pagi, muter Jayapura saja silakan, kami tidak usah ikut mengamankan. Anda silakan menilai sendiri, di Papua aman atau tidak. Buktikan jam 03.00 WIT sampai pagi, Anda jalan sendiri. Syaratnya Anda cukup memakai supir yang tahu jalan. Dia cuma, *yes, yes, yes, saja*". Danlantamal menjelaskan pula masalah pengamanan perbatasan secara tradisional sangat sukar dilaksanakan. Aturannya harus terlebih dahulu dirumuskan dan dikoordinasikan, terutama dengan petugas imigrasi, pemda, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, juga perlu disosialisasikan. Persoalan lainnya adalah keterbatasan jumlah petugas pos lintas batas. Di perbatasan Papua tidak ada tembok batas, semua orang bisa keluar-masuk melalui jalan-jalan tradisional, sehingga hal itu bisa menjadi ancaman tersendiri. Menurut Danlantamal "Bayangkan bila di Torasi ada pos imigrasi, hanya satu orang petugas yang bertahun-tahun bertugas sendirian di sana". Danlantamal menjelaskan pula bahwa Indonesia pernah kecolongan mengenai ganja, perlu diketahui di PNG ganja dijual bebas dan dapat masuk secara bebas ke Indonesia melalui jalur tradisional. Hal itu bukan murni persoalan pertahanan tetapi menyangkut masalah sosial dan kriminal yang perlu diantisipasi. Kiranya perlu disadari bahwa hal seperti itu termasuk permasalahan kedaulatan, penanganannya perlu kerja sama dengan pemda dan tidak boleh mengabaikan peraturan, seperti dikemukakan oleh Danlantamal. Romanus menambahkan bahwa petugas di pos perbatasan dijaga oleh 25 orang, dengan tugas pengamanan wilayah perbatasan saja, dilengkapi dengan persenjataan ringan. Adapun lantamal bertugas sebagai pendukung logistik dan administrasi operasi dan melaksanakan keamanan laut terbatas. Romanus pun menambahkan bahwa langkah pemerintah sudah sangat bijak, karena itu harus tetap diantisipasi komunikasi antarwarga di perbatasan harus berjalan, terutama melalui aspek kultural. Ia menambahkan pula bahwa tetap perlu dibuat

jalur masuk satu pintu di perbatasan untuk menghindari masuknya kejahatan dari PNG. Danramil Keerom menambahkan bahwa "Pada dasarnya, kendala pelaksanaan pengamanan perbatasan di Papua adalah terbatasnya personel imigrasi, dan adanya gangguan yang dilakukan OPM, seperti penghadangan. Namun demikian, OPM tidak melakukan serbuan begitu saja, meskipun mereka mengetahui kondisi dan kekuatan personil TNI di perbatasan ini. Mereka juga tidak memengaruhi masyarakat, mungkin mereka takut kepada TNI. Hal itu terbukti bahwa masyarakat pernah menyerahkan senjata yang digunakan OPM di masa lalu kepada TNI. OPM juga tidak pernah melakukan penculikan seperti apa yang dilakukan GAM di Aceh" (hasil wawancara dengan Danramil Keerom). Danrem Marauke memperkuat pernyataan Danramil Keerom mengenai aktivitas OPM, yaitu "OPM sebenarnya tidak kuat memengaruhi rakyat untuk mendukung perjuangannya. Justru sepengetahuan kami OPM takut sama hukum adat". Tidak ada usaha untuk mengambil hati masyarakat. Kelompok mereka sudah dibagi-bagi menjadi kelompok ideologi, kelompok bersenjata, dan kelompok politik. Ditambahkan pula oleh Danrem bahwa "Tapi menurut pandangan saya kok tidak ada politiknya? mungkin kelompok yang politik ada di Jayapura dan Abepura. Tetapi kalau di kampung yang di perbatasan, saya kira tidak ada kelompok politik". Bagaimana TNI menyikapi aktivitas OPM yang demikian itu sebagai perwujudan upaya bela negara, Pangdam XVII/Cenderawasih menyatakan pendapatnya (dikutip oleh Danramil Keerom), "TNI menghadapinya dengan tindakan persuasif kepada mereka. Sebagaimana telah diketahui bahwa OPM itu sebagai pihak pelaku konflik vertikal yang harus ditumpas. Namun demikian, jika sifat represif itu dilakukan, sesungguhnya aparat keamanan yang ditugaskan untuk menumpas OPM berimplikasi menumpas bangsa sendiri juga. Sebaliknya jika tidak ditumpas, OPM akan menyesatkan rakyat Papua dengan latar

belakang konflik politik vertikal yang tidak ada alasan untuk melakukan tindakan separatis berhubung kedaulatan Papua sudah final sebagai bagian dari NKRI baik *de jure* maupun *de facto*". Upaya bela negara merupakan pengamanan perbatasan di wilayah Papua, akan berimplikasi terhadap kurang menonjolnya aspek pembangunan, terutama terkait dengan pengembangan kualitas SDM masyarakat Papua melalui pendidikan, demikian tanggapan Stanley. Lebih jauh tanggapan tersebut dapat disimak berikut ini "Dari segi keamanan, itu karena aparat bertambah setiap hari, maka masyarakatnya aman. Nah, itu pertama, tapi keamanan saja yang menonjol, sedangkan di sisi pembangunan lain masih belum menonjol, enam perguruan tinggi di Merauke yang sudah menghasilkan banyak sarjana, tetapi sarjana-sarjana itu diabaikan. Mestinya ada kebijakan *affirmative* bahwa semua sarjana diambil dari lulusan keenam perguruan tinggi itu. Kalau Menteri Pendidikan Nasional Indonesia telah mengakui, berarti kualitasnya sudah sesuai". "Kenapa di dalam testing harus dari Jawa yang datang, lokalnya tidak dimanfaatkan?" "Misalnya lulusan lokalnya tidak dimanfaatkan karena rendah kualitasnya, berarti itu kewajiban pemda untuk meningkatkan kualitasnya. Stanley menambahkan lagi "Sangat menyedihkan memang, orang Papua ditolak, orang lain yang lulus/diterima si rambut panjang! di samping itu, disadari juga bahwa mungkin masalah kurikulum bisa sama, tapi untuk masalah karakter Pemda dan lulusan perguruan tinggi bisa berbeda dengan "si rambut panjang".

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan merupakan kelanjutan dari tahap deskriptif tematik dan reduksi data—sesuai prosedur *grounded theory*—menghasilkan tiga tema, yaitu (1) politik NKRI vs politik abolisi, (2) pemberdayaan

masyarakat, dan (3) keamanan dan pengamanan perbatasan. Terkait dengan implementasi kebijakan bela negara sebagai pokok permasalahan dalam membahas ketiga tema di atas, sesungguhnya telah diatur dalam UU RI No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3). Substansi UU tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bela negara diwujudkan melalui penyelenggaraan pertahanan negara. Itu sebabnya ilmu pertahanan dipilih sebagai *leading theory* dalam proses analisis selanjutnya.

Realisasi implementasi kebijakan bela negara itu sendiri, menurut ayat (2) adalah pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai profesi, harus diatur dengan undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya belum terealisasi. Sejauh ini unsur penyelenggara pertahanan negara yang dibentuk secara insidental oleh Kemhan baru melaksanakan kegiatan sosialisasi, seperti seminar, diskusi terfokus, ceramah, dan upacara bendera atau sejenisnya. Unhan yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara pertahanan, kini telah dan akan terus melakukan penelitian, meskipun baru berupa sosialisasi dan penelitian awal. Kegiatan tersebut tetap penting, bukan saja karena amanat UU, tetapi lebih melihat objeknya, yaitu situasi dan kondisi Papua yang belum mengalami kemajuan berarti sejak dimulainya proses integrasi tahun 1963.

a. Politik NKRI vs Politik Abolisi.

Penolakan Stanley untuk menjadikan Papua sebagai bagian dari NKRI harus dipahami sebagai refleksi kekecewaan menyaksikan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat Papua dari waktu ke waktu tidak ada kemajuan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, program pemerintah, khususnya Kemhan, tentang implementasi kebijakan bela negara yang baru terbatas pada kegiatan sosialisasi dan

penelitian awal diharapkan bisa memberikan umpan balik terhadap proses tindak lanjut berikutnya. Keberadaan Unhan dengan CDBR dan kehadiran Ilmu Pertahanan yang sifatnya inter-disipliner mestinya disambut dengan semangat baru oleh sejumlah ilmuwan dan peneliti. Bersama *stakeholder* terkait terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan bela negara.

Semangat baru dimaksud diharapkan mampu merefleksikan kreativitas dan improvisasi dalam penerapannya, sekaligus merupakan daya dorong terhadap pihak eksekutif dan legislatif dalam menyusun UU bela negara sebagaimana diamanatkan UU Pertahanan Negara.

Berkenan dengan perbedaan pandangan antara Stanley yang menolak politik NKRI, dengan pandangan Terryanus dan Jeffri yang menawarkan politik Abolisi, diperlukan pemikiran khusus. Apalagi terdapat kesamaan prinsip di antara keduanya, yaitu keberatan menerima empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, UUD '45, dan Bhineka Tunggal Ika. Bahkan perbedaan dapat dikatakan bertentangan antara politik NKRI dengan politik abolisi tersebut. Dalam ilmu antropologi, tidak serta-merta diartikan sebagai pertentangan. Bahkan dalam konteks keilmuan, khususnya ilmu pertahanan yang juga meliputi bidang studi budaya—sesuai cakupannya termasuk *strategic culture*—bisa disinergikan dengan ilmu antropologi. Para pakar ilmu antropologi dalam konteks ini, memopulerkan dua pandangan yaitu *emic view* dan *etic view* (Goodenough, 1970 dan Marvin, 1976:31-48). *Emic view* lebih mengedepankan *intrinsic values* 'nilai dasar' dan *local wisdom* 'kearifan lokal' yang oleh Terryanus dan Jeffry direfleksikan sebagai politik abolisi. Sementara *etic view* yang lebih mengedepankan nilai-nilai universal dan pengaruh dari luar, dalam hal ini nilai-nilai bela negara itu sendiri yang mengusung empat pilar kebangsaan (Pancasila, NKRI, UUD '45, dan Bhineka Tunggal Ika).

Faktor penguat politik abolisi adalah teori konflik, yang berbunyi para pimpinan

pemberontak itu pada umumnya cerdas, cerdik, berani, teguh pada ideologi yang diperjuangkannya, dan memiliki idealisme tinggi untuk kesejahteraan rakyat yang diperjuangkannya. Oleh karena itu, sangat memungkinkan jika politik abolisi itu menjadi pilihan lunak untuk instrumen resolusi konflik vertikal di Papua. Para pimpinan OPM yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dapat dicalonkan sebagai gubernur, bupati, dan walikota. Pendekatan itu diperkirakan akan lebih efektif untuk meluluhkan militansi pejuang kemerdekaan Papua daripada pilihan penekanan secara represif oleh militer.

Analisis di atas, mengingatkan sebuah fakta empiris yang terjadi di Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD), Irwandi Yusuf, seorang tokoh intelektual GAM (gerakan Aceh Merdeka), ketika diberi hak untuk dipilih menjadi Gubernur Provinsi NAD pada 2006, meski pada awalnya belum secara eksplisit mengakui empat pilar kebangsaan RI, namun ketika resmi terpilih menjadi Gubernur Provinsi NAD hingga sekarang idealisme yang bersangkutan terhadap ideologi GAM sudah ditanggalkan.

Faktor penguat lainnya adalah soal ketaatan dan kepatuhan orang-orang Papua terhadap hukum adat sebagaimana telah digambarkan oleh pejabat militer setempat, seperti Danramil Keerom. Setidaknya terdapat dua hal penting untuk diangkat dari pernyataan para pejabat dan tokoh OPM di Papua terkait dengan kepatuhan anggota OPM terhadap sistem adat. *Pertama*, menurut ilmu antropologi, terkait dengan penjelasan pakar antropologi C. Kluckohn dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Universal Categories of Culture* (1953) (Koentjaraningrat dalam Moleong, 2010:165). bahwa hukum adat di mana pun, termasuk di Papua, merupakan bagian dari sistem sosial atau organisasi sosial dalam suatu struktur kemasyarakatan. *Kedua*, alasan ketaatan yang mengedepankan konsekuensi OPM tidak akan mendapat dukungan perjuangan dari rakyat

Papua perlu direfleksikan sebagai apresiasi pengalaman dan komunitas masyarakat Papua yang tertindas. Demikian juga pernyataan Teryanus menyangkut komitmennya untuk tidak melakukan pengkhianatan terhadap tuntutan atau permintaan politik abolisi, dapat direfleksikan sebagai gerakan sosial yang menuntut keadilan atas perlakuan pemerintah selama ini.

Perlakuan ketidakadilan pemerintah itulah yang direfleksikan dalam penelitian ini sebagai politik NKRI yang dicerai dan dicurangi oleh sejumlah oknum pejabat pmda di Papua yang tidak bertanggung. Misalnya bupati yang sering tidak berada di wilayah tugasnya. Pejabat pmda Papua itu bahkan berada di Jakarta dengan alasan yang dibuat-buat. Pada kenyataannya, mereka mengkhianati sumpah jabatan. Mereka melakukan praktik sosial yang tidak sepatasnya dilakukan seorang pejabat. Para pejabat tersebut memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat untuk lepas dari penderitaan. Perilaku pejabat pmda Papua itulah yang menjadi penyebab OPM masuk hutan dan melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan berawal dari fakta bahwa pengelolaan dana otsus maupun dana CSR dari *Freeport* selama ini tidak jelas. Patut diungkap kembali pernyataan Jeffry—meski belum teruji—bahwa “Kami bukan separatis. Yang kami tantang selama ini, dan kami tidak patuh karena pemerintah keluar dari aturan, selama ini kan kami pelajari semua kebijakan pemerintah Papua dan RI. Kalau Pemerintah jujur, siapa yang berani menantang”.

Beberapa pertanyaan kemudian timbul, “Siapa sebenarnya, dalam konteks permintaan politik abolisi, yang lebih pantas mendapat apresiasi? Pejabat pengawal politik NKRI atau tokoh OPM yang dipersepsikan mengkhianati NKRI?” Jika pemerintah memberikan hak politik abolisi kepada tokoh OPM yang bersangkutan, pemberian tersebut merupakan apresiasi pemerintah RI terhadap nilai-nilai NKRI yang sesungguhnya.

Jika analisis di atas diterima berdasarkan kaidah *grounded theory*, gagasan politik abolisi dapat diterima secara akademik. Hal itu berarti implementasi kebijakan bela negara di Papua melahirkan implikasi teoretik, yakni menerima ilmu pertahanan dan ilmu antropologi sosial budaya sebagai pendekatan utama. Jika politik abolisi dapat diterima secara akademik, secara praktis tentu saja, masih memerlukan pendalaman lebih jauh oleh pemerintah, yang dalam penelitian tidak dibahas.

a. Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan UU RI No. 3, 2002, tentang Pertahanan Negara, Pasal 9, ayat (1): “Setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pertahanan negara”. Artinya, implementasi bela negara dapat diwujudkan melalui tugas pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh setiap unsur pertahanan negara termasuk TNI dan Unhan. Tugas ini adalah salah satu tugas pokok TNI yang termasuk dalam operasi militer selain perang (OMSP) (Dephan RI, 2007:74). Pemberdayaan masyarakat Papua adalah bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan. Dengan demikian, tema pemberdayaan masyarakat Papua dalam penelitian ini merupakan domain pertahanan negara. Artinya ilmu pertahanan dengan *strategic culture* sebagai salah satu cakupannya dapat diterapkan dalam implementasi kebijakan bela negara di Papua di satu pihak. Pemberdayaan masyarakat Papua yang memiliki sensitivitas tinggi di lain pihak tentu amat relevan jika didekati melalui ilmu antropologi sosial budaya.

Dalam menerapkan kedua ilmu pertahanan dan ilmu antropologi sosial budaya di atas, isu-isu kritis yang diangkat dalam tema ini sesuai dengan proses *grounded theory*, meliputi (1) pemberdayaan suku Ambone dan Kamoro melalui isu pengelolaan *scrub besi tua* dan CSR *Freeport*; (2) isu pendidikan masyarakat

Papua; (3) isu adat Papua, dan (4) keberadaan kelompok etnik masyarakat Papua. Pembahasan masing-masing isu tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Pernyataan Pangdam XVII Cendrawasih mengenai isu pengelolaan *scrub besi tua* dan *CSR Freeport* untuk memberdayakan suku Ambune dan suku Kamoro. Menurut Pangdam, *pertama* hal tersebut merupakan perwujudan dari OMSP dan konsistensi dan komitmen TNI dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan (dulu binter). *Kedua*, isu pendidikan masyarakat Papua yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh OPM, seperti Jeffry, Terryanus, dan Stanley menunjukkan bahwa perhatian para petinggi OPM terhadap ketidakadilan pemerintah di bidang pendidikan juga menjadi salah satu alasan utama mengapa TPN OPM lari masuk hutan untuk mengadakan perlawanan. Isu ini hendaknya menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah, terutama TNI dan Unhan yang terlibat dalam implementasi kebijakan bela negara dalam konteks pemberdayaan masyarakat Papua, terutama dalam mengelola sistem pendidikan bagi masyarakat Papua ke depan.

Pernyataan Jeffri menunjukkan bahwa pengelolaan sistem pendidikan oleh pemerintah selama ini sama sekali tidak atau belum mengakomodasi atau bahkan tidak menangkap aspirasi masyarakat Papua yang sebenarnya. Sebaliknya, justru yang muncul adalah ketidakadilan yang menimbulkan kekecewaan mendalam, sehingga mendorong mereka masuk hutan dan menyatakan kemerdekaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, dapat disimak bahwa makna *Bhineka Tunggal Ika* yang sebenarnya justru menyadarkan tokoh OPM untuk enggan menggelorakan hasrat untuk merdeka. Bukankah *Bhineka Tunggal Ika* salah satu nilai bela negara sekaligus salah satu pilar bangsa yang hendak ditransfer kepada mereka. Akan tetapi, realitanya mereka justru mengkritik pengejawantahan nilai tersebut oleh para pejabat emda dalam melakukan

praktik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dampak lain yang dapat disimak, adanya kecenderungan yang bernuansa politik ekonomi, yang sengaja dikemas untuk menciptakan konflik horizontal. Fenomena ini tidak atau belum ditelusuri secara mendalam dalam penelitian ini, tentu diperlukan pendalaman tersendiri dalam penelitian berikutnya.

Mengingat hal tersebut merupakan benih penyebab semakin mengkrystalnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kebutuhan penelitian seperti itu pada waktu yang akan datang juga masih merupakan domain disiplin ilmu pertahanan, namun tentu tetap dibutuhkan sinergitas bersama disiplin ilmu lainnya.

Bagaimana dengan kedalaman sistem pendidikan yang diinginkan oleh mereka. Salah satu tokoh, bernama Stanley, adalah seorang didikan Belanda. Ia memulai penuturannya dengan menekankan adanya ancaman terhadap kelangsungan eksistensi NKRI yang direfleksikan dengan adanya kecenderungan kaum intelektual OPM yang bergerak di dunia internasional.

Apakah pernyataan Stanley di atas adalah refleksi dari sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan mereka? Hal ini perlu pemikiran kemendiknas lebih jauh. Penjelasan Stanley yang sangat detail dan komprehensif, tentu ditujukan tidak hanya kepada Kemhan beserta unsur-unsur yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan bela negara, tetapi justru lebih kepada pengelola kebijakan di bidang pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan Nasional. Desain kurikulum pendidikan untuk kepentingan masyarakat Papua mesti dikemas secara khusus menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat Papua. Bila memungkinkan kiranya desain kurikulum tersebut dibuat khusus sehingga dapat mengalihkan minat para anggota OPM untuk tidak memilih keluar negeri. Satu esensi yang dapat ditangkap dari penuturan Stanley tersebut bahwa memang Stanley

memproyeksikan cara orang Belanda yang mendidiknya, tetapi Belanda mendahulukan pembentukan sikap mental, etos kerja daripada penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks implementasi kebijakan bela negara, ada baiknya desain kurikulum disinergikan dengan kepentingan pertahanan negara. Penerapannya tentu saja senantiasa memperhatikan substansi *emic view* dan *etic view*. Ketiga, isu adat Papua dan keberadaan kelompok etnik masyarakat Papua. Dalam konteks ini, keberadaan adat dengan Dewan Adat Papua sebagai mitra pemerintah. Hal itu menarik dimaknai mengingat jumlah suku pada masyarakat Papua sebanyak 3000 merupakan suatu entitas kebudayaan yang harus dihormati dan diapresiasi. Dalam arti, jika penghormatan dan apresiasi tersebut ingin mendapat respon positif, fenomena sebagaimana yang dipaparkan Stanley di atas, memerlukan pendekatan teori kebudayaan dan teori antropologi sosial budaya. Secara akademis kedua teori tersebut termasuk cakupan ilmu pertahanan sebagai ilmu interdisiplin. Secara praktis unsur pertahanan negara sebagai pelaku implementasi kebijakan bela negara dapat bermitra dengan pakar antropologi sosial budaya dan atau pakar kebudayaan untuk melakukan dialog konstruktif sehingga sasaran dan tujuan pemecahan masalah dapat tercapai secara optimal.

Data kekayaan budaya Papua justru tidak tercatat di kesbangpol, tetapi malah tercatat di PBB. Hal itu terjadi kemungkinan karena kurangnya penghormatan seperti yang diinginkan oleh Dewan Adat Papua. Dalam arti dialog-dialog seperti dijelaskan di atas belum di wujudkan sebagaimana mestinya. Apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Stanley dan wakil MRP, tentang keberadaan adat dengan Dewan Adat Papua, serta kebudayaan terkait dengan kelompok antaretnik, yaitu disyaratkannya pendekatan khusus oleh unsur pertahanan negara dalam mengimplementasikan kebijakan bela negara, agar bisa masuk ke dalam relung hati masyarakat Papua.

Pendekatan tersebut telah dilakukan berdasarkan fakta dari pengalaman Agus Affianto yang bertahun-tahun melakukan upaya pemberdayaan masyarakat adat Papua. Menurut Agus seharusnya rakyat Papua disejahterakan dengan tulus dan sepenuh hati. Rakyat Papua pun tulus bila diperlakukan manusiawi dan adat kebiasaannya tidak diganggu. Mereka dapat dididik melalui adat kebiasaannya. Agus menemukan beberapa nilai-nilai bela negara dalam kegiatan bercocok tanam yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungan Papua. Dalam pemberdayaan masyarakat di atas, khususnya pengelolaan adat dan kebudayaan masyarakat Papua dengan dinamika situasi dan kondisi terkini, sepertinya pendekatan teori nasionalisme maupun teori antaretnis yang memiliki kecenderungan menimbulkan implikasi identitas kesukuan kemudian digantikan identitas nasional “tidak sesuai”. Dengan kata lain “tidak diterima” khususnya pada situasi dan kondisi ini. Secara akademis, pembahasan tema pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ilmu pertahanan dan ilmu antropologi sosial budaya dapat diterima, sementara pendekatan melalui ilmu nasionalisme dan ilmu antaretnis yang merujuk pada teori Don Hondelmen tidak diterima.

b. Keamanan dan Pengamanan Perbatasan.

Relevansi implementasi kebijakan bela negara dengan tema ini sangat kuat. Semakin kondusif kondisi keamanan wilayah perbatasan Papua, tidak hanya merupakan salah satu indikator keberhasilan pengamanan perbatasan itu sendiri, tetapi juga mengindikasikan keberhasilan implementasi kebijakan bela negara. Substansi perwujudan upaya bela negara melalui pertahanan negara, salah satunya, menciptakan keamanan di wilayah perbatasan, termasuk Papua. Pertanyaannya, betulkah kondisi keamanan di wilayah Papua tergolong aman sebagaimana dillustrasikan oleh Pangdam XVII/Cendrawasih. Pernyataan Pangdam

XVII/Cenderawasih di atas dapat dipahami secara kasuistis. Misalnya kondisi keamanan di kota Jayapura, Pangdam memberikan jaminan keamanan kepada senator Amerika Serikat yang melaksanakan kunjungan ke kota atau tempat tersebut. Namun, sudah menjadi pandangan umum bahwa Papua, sejak lama tergolong wilayah konflik, karena keberadaan OPM dengan segala dinamikanya. Selain OPM, karakteristik wilayah perbatasan pada umumnya, terutama perbatasan darat, di tiga wilayah yaitu Kalimantan, Papua, dan Timor Leste yang banyak dilalui pelintas batas yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, seperti membawa ganja, obat terlarang, pencurian sumber daya alam, serta berbagai jenis penyusupan. Semua itu dapat dijadikan parameter keberhasilan implementasi kebijakan bela negara.

Setidaknya terdapat lima pernyataan kunci yang perlu diangkat dari temuan penelitian yang berupa pendapat tokoh baik sipil maupun militer, yaitu (1) secara umum kondisi keamanan di Papua tergolong “aman”, tetapi aspek pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan kurang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya; (2) pentingnya pengamanan tradisional, meskipun sulit diwujudkan; (3) aktivitas OPM terbatas pada gangguan berupa penghadangan terhadap pasukan TNI, namun tidak berusaha untuk memengaruhi masyarakat Papua, khususnya di perbatasan; (4) keberadaan OPM disikapi oleh TNI dengan tindakan persuasif.

Penggambaran kondisi keamanan di Papua yang tergolong aman dihadapkan dengan keberadaan OPM dengan aktivitas penghadangan terhadap pasukan TNI yang melaksanakan patroli, pada masa mendatang perlu pendekatan *strategic culture*. Hal itu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan sikap dan tindakan persuasif TNI dalam menghadapi OPM. Pendekatan *strategic culture* dimaksud, antara lain TNI dapat bermitra dengan ilmuwan atau pakar di bidang tertentu sesuai kebutuhan masyarakat Papua pada umumnya dan anggota OPM pada

khususnya. Sementara itu, sikap dan tindakan persuasif TNI merupakan sikap yang seyogyanya dijadikan acuan dasar dalam mengimplementasikan kebijakan bela negara.

Kaitan antara implikasi keamanan terhadap kualitas masyarakat Papua terkait dunia pendidikan seperti digambarkan di atas adalah bahwa secara akademis implementasi kebijakan bela negara di wilayah perbatasan Papua, menunjukkan pentingnya pendekatan yang mensinergikan antara disiplin ilmu-ilmu yang relevan. Dalam konteks ini, ilmu pertahanan dengan ilmu antropologi sosial budaya. Implementasi kebijakan bela negara dapat dianalisis terkait dengan keberadaan pejabat Pemda seperti bupati di wilayah tugasnya. Hal itu terkait dengan pejabat pemda sebagai pemimpin di daerah, sebenarnya dapat dijadikan mitra oleh unsur pertahanan negara dalam merealisasikan implementasi kebijakan bela negara. Contohnya unsur muspida yang tampak kompak di depan masyarakat bila ada acara. Hal tersebut dapat dijadikan sarana untuk menggelorakan implementasi kebijakan bela negara.

Pangdam XVII/Cenderawasih memaparkan kondisi keamanan di Papua terkait dengan status tertib sipil “Kenapa kepala daerah di sini selalu diundang ke Jakarta? Ketika kepala daerah memenuhi undangan ke Jakarta, sehari, seminggu juga belum tentu kembali. Kapan mau memimpin daerahnya? Masalahnya “bermuaranya TNI dan Polri yang menangkap sampah dari semua itu”. Padahal kita seharusnya status tertib sipil? Tertib sipil dalam artian tentara hanya latihan saja. “Bukan apa-apa, kan ada Pemda”. “Tetapi kenyataannya, kita di sini mohon maaf, pemdanya mungkin hanya beberapa kabupaten yang bisa kita andalkan”.

SIMPULAN

Secara ideal, sesuai amanat UU Pertahanan Negara RI, No. 3, 2002, realisasi dari implementasi kebijakan bela negara masih harus menunggu perundang-undangan yang bersifat operasional, namun temuan hasil penelitian di Papua menunjukkan adanya kecenderungan yang dinamis dalam realisasinya. Kecenderungan yang dinamis dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pada tataran praktis operasional, unsur-unsur penyelenggara pertahanan negara yang secara langsung mengimplementasikan kebijakan bela negara di Papua masih didominasi oleh unsur-unsur TNI. Adapun wujud implementasi kebijakan bela negara tersebut meliputi (i) dari aspek politik, dengan cara-cara persuasif unsur-unsur TNI telah melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, dengan indikasi keberhasilan dapat terlihat pada permintaan politik abolisi kepada Presiden RI. Keberhasilan politik NKRI yang direpresentasi TNI, seolah-olah membalut luka NKRI yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pemda Papua; (ii) Dari aspek sosio-ekonomi-kultural yang direfleksikan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan (OMSP), TNI telah menunjukkan konsistensi dan komitmennya dalam mewujudkan implementasi kebijakan bela negara. Tugas-tugas ini sangat dimungkinkan untuk dikembangkan secara lebih baik lagi di masa datang, jika aspek antropologi lebih ditonjolkan dengan mengembangkan kemitraan bersama para pakar di bidang tersebut; (iii) Dari aspek keamanan dan pengamanan perbatasan, meskipun terkendala oleh terbatasnya jalur transportasi darat sebagai pilar kunci dalam mengoptimalkan pengamanan perbatasan, TNI dengan segala kemampuan dan fasilitas yang

dimiliki tetap berupaya semaksimal mungkin menciptakan kondisi aman.

2. Pada tataran akademik, bersama dengan mitra tugasnya, CDBR Unhan telah melaksanakan penelitian dengan mengembangkan kaidah-kaidah penelitian yang lebih membumi, dalam arti mampu memenuhi tuntutan kultural lokus penelitian. Implikasi teoretik yang ditimbulkan telah menciptakan teori baru, yakni antropologi pertahanan. Dengan teori baru tersebut, berarti CDBR khususnya dan segenap peneliti ataupun ilmuwan Unhan dapat menjadikan teori baru ini sebagai kekhususan dalam melakukan penelitian di wilayah perbatasan.

SARAN

Dari simpulan di atas, rekomendasi hasil penelitian yang dapat diajukan terutama kepada Kemhan adalah *Pertama*, diharapkan hasil penelitian ini dapat lebih menggugah pihak terkait dalam penyusunan perundang-undangan untuk lebih mengakselerasi terbitnya UU bela negara. *Kedua*, Kemhan sebagai penjuror dapat mengakselerasi rancangan pembangunan infrastruktur di Papua, terutama jaring transportasi darat yang menghubungkan pos lintas batas di sepanjang garis perbatasan. Pembangunan infrastruktur ini dapat dipadukan dengan rancangan pembangunan yang sudah ada lebih dulu. Sebagai pelaksanaannya dapat dikerahkan satuan-satuan TNI seperti Yonzipur dan Yonzikon.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPP. 2011. *Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011 – 2025*.
- EriksenTH. 2001. *Small Places, Large Issues: An Introduction To Sosial And Anthropology*. Second Edition. London.

- Gibbons, A. 1981. *The Moody Bible Institute of Chicago*. Chicago: USA.
- Handelman, D. 1977. *Ethnic Groups: An International Periodical of Ethnic Studies Bronx*. New York, Vol.1, No. 3.
- Hurs, H. 2001. *Territorial autionomy; Permanent solution or step toward seccesion* http://www.indonesia.missionny.or/issuebaru/Mission/empwr/paper_HurstHannum_1.pdf
- Biro Hukum, Setjen Dephan. 2007. *Buku Himpunan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, al UU No. 34 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta :Departemen Pertahanan RI.
- La Ode, MD. 2012. *Etnis Cina Indonesia dalam Politik di Era Reformasi*. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.
- Leifer, M. 1980. *Conflict and Regional Order in South-East Asia*. London : International Institute for Strategic Studies.
- Magenda,B.Djabir. 2001.Terlstra No. 64, Januari--February 2001, hal. 50-56.
- Moleong,LJ. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Morgenthou, Hans J. *Politic among Nation*
- Soepandji, B.S. 2010. Naskah Bahan ajar Pembinaan Bela Negara, Ditjen Pothan. Jakarta :KEMHAN.
- Soekarno.1963. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama, Cet. Kedua, Jakarta.
- Solossa, JP. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua Dalam NKRI*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Sukidin, B. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya :Insan Cendekia Surabaya.
- Sutisna, S. 2006. *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*. Pusat Pemetaan Batas Wilayah. Jakarta: BAKOSURTANAL.
- Sutisna, S., S. Sumarsono, dkk. 2012. *Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Perbatasan NKRI, Kemitraan*.
- Sutisna, S., MD. La Ode, dkk. 2012. *Laporan dan Dokumentasi Survei Lapangan dalam rangka Pengkajian Manajemen Perbatasan di Provinsi Papua*. Jakarta: UNHAN.
- Teteray, B. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Tippe, S. 2012. "Hasil penelitian tentang antropologi pertahanan". Diterbitkan dalam *Jurnal Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia*. Jakarta : Unhan.
- Weiner, M. 1966. *Political Integration and Political Development*, Dalam Jasson L Finkle dan Richard W. Gable, *Political Development and Social Change*. New York :John Wiley.
- Undang Undang RINo. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang Undang RINo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang RINo. 34 tahun 2004 tentang TNI
- Undang Undang RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Perpres No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Perpres No. 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.